

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang sangat kaya akan sumber daya alamnya. Karena hal tersebut, maka tidak heran jika sebagian besar mata pencaharian masyarakat berasal dari sektor pertanian. Sejauh ini terbukti bahwa sektor pertanian memiliki peranan yang sangat besar dalam perekonomian negara baik secara mikro maupun secara makro. Secara mikro sektor pertanian berperan bukan hanya sebagai sumber mata pencaharian pokok sebagian besar penduduk desa, namun juga sektor pertanian termasuk sub-sektor peternakan, yang merupakan tempat utama untuk lapangan kerja keluarga pedesaan. Selain itu usaha pertanian sebagai tempat mengembangkan hobi dan juga sebagai tempat rekreasi penduduk kota jika ke desa, kemudian sektor pertanian berperan sebagai penghasil bahan makanan, bahan obat-obatan tradisional, bahan baku untuk kecantikan, dan lain-lain.

Sedangkan secara makro, peranan sektor pertanian dalam perekonomian negara adalah penghasil produk-produk ekspor yang dinyatakan dengan nilai devisa sektor pertanian dengan periode tertentu, penghasil bahan baku industri khususnya agroindustri, penghasil bahan pangan dunia (sandang, pangan, papan), sebagai alat

membangun hubungan ekonomi antar negara dan juga sebagai alat menjalin hubungan persahabatan antar negara baik secara bilateral atau unilateral



dan juga sebagai alat menjalin hubungan persahabatan antar negara di suatu kawasan seperti ASEAN. Sektor pertanian juga berperan penting dalam menjaga stabilitas perekonomian rakyat dan stabilitas pemerintahan seperti beras di Indonesia, roti di negara-negara Eropa dan daging di negara-negara dingin. Pertanian menjadi alat menjaga ketahanan nasional terutama jika ada perang antar bangsa atau suatu negara dikenai embargo ekonomi secara internasional.

Dalam perspektif Islam, pentingnya sektor pertanian sebagai sumber pangan tercantum dalam Qur'an Surat 'Abasa ayat 26-32 :

ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٢٩﴾ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ﴿٣١﴾
مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya (26), Lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu (27), anggur dan sayur-sayuran (28), zaitun dan kurma (29), kebun-kebun yang lebat (30), dan buah-buahan serta rumput-rumputan (31), Untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu (32)”. (QS. 'Abasa 26-32)

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan menyebutkan bahwa terdapat lima komoditas utama yang wajib dicapai oleh pemerintah Indonesia, yaitu beras, jagung, gula, kedelai dan daging. Salah satu

komoditas strategis yang sangat berpengaruh terhadap stabilitas sosial, politik dan ekonomi yaitu beras dan jagung.

Kecamatan Lemahsugih merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Majalengka. Kecamatan Lemahsugih merupakan daerah dengan potensi pertanian yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kondisi iklim, topografinya dan keadaan tanahnya. Dimana dengan daerah yang bertopografi berbukit dengan prosentase kemiringan 20^0 sampai dengan 40^0 . Ketinggian tempat antara 375 sampai dengan 1.012 dpl dengan curah hujan rata-rata 2.784 mm pertahun dan rata-rata hari hujan 12 hari perbulan, sehingga dengan demikian kecamatan Lemahsugih berada pada tipe iklim agak basah. Sedangkan jenis tanah yang dominan di Kecamatan Lemahsugih untuk lahan sawah adalah latosol. Struktur tanahnya lemah gembur dan pH nya normal antara 5-6,5. Sehingga dengan keadaan tersebut memungkinkan tumbuh suburnya potensi sumber daya alam yang ada. Kecamatan Lemahsugih juga dikenal dengan hasil pertaniannya yang cukup baik seperti sayur-sayuran. Tomat, kol, bawang daun dan cabai merupakan jenis sayuran yang mampu dihasilkan oleh Kecamatan Lemahsugih untuk tidak hanya kebutuhan daerah sekitar Lemahsugih tapi juga diluar daerah Kecamatan Lemahsugih.

Beras merupakan salah satu makanan pokok bangsa Indonesia pada umumnya. Namun, saat ini bukan hanya beras saja yang menjadi makanan pokok bangsa Indonesia, sebagian besar penduduk Indonesia juga menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Hal ini disebabkan salah satunya karena ketersediaan beras yang terkadang sulit dan mahal. Persediaan beras secara nasional lebih sedikit dibanding kebutuhan akan beras. Selain itu jagung juga merupakan salah satu

sumber karbohidrat, bahkan jagung juga merupakan tanaman pangan sebagai sumber kalori, sumber vitamin, sumber mineral, dan kaya antioksidan, sehingga fungsinya sama dengan beras. Beberapa daerah di Indonesia yang menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya adalah Madura, Nusa Tenggara Timur, Minahasa dan Sigidong (Temangggung, Jawa Tengah). Karena peranannya yang sangat penting sebagai makanan pokok, maka ketersediaan baik beras maupun jagung harus tetap dijaga, agar mampu memenuhi kebutuhan konsumsi nasional.

Kecamatan Lemahsugih sebagai salah satu sentra penghasil beras di Kabupaten Majalengka, mampu menopang sebagian besar kebutuhan konsumsi lokal. Selain itu kecamatan Lemahsugih merupakan salah satu penghasil tanaman pangan jagung di Kabupaten Majalengka. Produksi jagung bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan konsumsi dari Kecamatan Lemahsugih saja, namun juga mampu memenuhi permintaan dari luar daerah. Oleh karena itu ketersediaan beras dan jagung harusnya bisa tetap stabil. Namun, beberapa tahun terakhir ini produksi jagung dan padi di Kecamatan Lemahsugih mengalami penurunan. Hal ini dapat terlihat di tabel berikut :



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Produksi Padi dan Jagung

Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2015

Tahun	Target (Ton)		Realisasi (Ton)		%		Minimal %		Maksimal %		Ket	
	Padi	Jagung	Padi	Jagung	Padi	Jagung	Padi	Jagung	Padi	Jagung	Padi	Jagung
2011	40.010	5.211	31.935	4.921	79	94	80	78	95	95	Tidak Tercapai	Tercapai
2012	42.978	5.639	37.934	5.498	88	97	80	78	95	95	Tercapai	Tercapai
2013	45.091	6.000	41.823	4.010	92	66	80	78	95	95	Tercapai	Tidak Tercapai
2014	46.943	6.142	35.297	2.992	75	48	80	78	95	95		

											Tidak Tercapai	Tidak Tercapai
2015	47.000	6.300	35.410	3.075	75	48	80	78	95	95	Tidak Tercapai	Tidak Tercapai

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka dari Dinas Pertanian dan Peternakan dan Kantor Kecamatan Lemahsugih

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk target produksi padi pada tahun 2011 tidak tercapai, hanya terealisasi sebesar 31.935 ton begitupun pada tahun 2014 dan 2015 yang hanya terealisasi sebesar 35.297 ton untuk tahun 2014 dan 35.410 ton untuk tahun 2015. Begitupun dengan produksi jagung yang pada tahun 2013, 2014, 2015 tidak mencapai target.

Banyak faktor yang menentukan peningkatan keberhasilan produksi padi dan jagung. Salah satu program atau kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjaga produksi pertanian khususnya tanaman pangan agar tetap efektif adalah dengan mengeluarkan subsidi pupuk. Tujuan utama dari adanya kebijakan ini adalah untuk membantu petani agar dapat menerapkan teknologi baru pertanian dengan biaya produksi yang rendah sehingga peningkatan produksi padi/beras dan jagung dapat dicapai dalam waktu yang relatif singkat. Pupuk menjadi suatu kebutuhan primer bagi seorang petani, karena pupuk merupakan salah satu komponen penting dalam proses produksi pertanian, untuk menghasilkan panen yang maksimal.

Jaminan ketersediaan pupuk untuk tercapainya swasembada pangan harus tersedia bagi petani dengan mudah dan murah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 21 yaitu : Ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk dan/atau alat dan mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan. Dan Ayat (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu dan tepat

jumlah. Namun dalam pelaksanaannya sering mengalami kendala, fenomena yang terjadi seperti kelangkaan pupuk dan harga pupuk yang mahal sering terjadi di lapangan.

Adanya penurunan produksi baik beras maupun jagung di Kecamatan Lemahsugih tersebut disebabkan salah satunya oleh proses produksi yang tidak maksimal, dimana pemberian pupuk sebagai salah satu komponen penting tidak optimal/pas. Sulitnya mendapatkan pupuk menjadi kendala bagi petani dalam mengoptimalkan hasil panen. Sistem pendistribusian pupuk yang dilakukan dengan cara subsidi pupuk diberikan pemerintah tidak langsung kepada petani, tetapi diberikan kepada produsen (pabrik pupuk). Subsidi digunakan untuk membayar beban biaya produksi sehingga ketika sampai ke petani tercapailah Harga Eceran Tertinggi (HET). Namun, dalam prakteknya di lapangan HET pupuk tidak tercapai. Pada dasarnya HET pupuk tidak tercapai disebabkan oleh dua hal. Yang pertama alokasi pupuk bersubsidi kurang atau berkurang sehingga pupuk langka. Kedua, ada kebijakan pembelian, pembelian pupuk melalui kelompok tani dengan mekanisme Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), maka yang terjadi ketika pupuk di Lini IV (kios resmi) diantar ke titik kelompok tani memerlukan biaya transportasi, tenaga, dan biaya administrasi untuk pengurus kelompok tani. Ditambah lagi dengan minimnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam proses pendistribusian pupuk bersubsidi. Padahal hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI NO. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk pertanian pasal 25 ayat 2D yang berbunyi Komisi pengawasan pupuk dan pestisida di tingkat kabupaten/kota yang

ditetapkan oleh bupati/walikota, melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya serta melaporkannya kepada bupati / walikota dengan tembusan kepada produsen penanggung jawab wilayah, direktur jenderal perdagangan dalam negeri dan Direktur jenderal standarisasi dan Perlindungan Konsumen. Situasi yang demikian tersebut jelas menyebabkan petani tidak untung karena pada saat dibutuhkan pupuk selalu sulit didapatkan dan kalau dapat harga pupuk tidak sesuai HET.

Padahal dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 Pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani / kelompok tani di penyalur lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Hal ini diperjelas dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI NO. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk pertanian pasal 20 ayat 4 yang berbunyi Pengecer wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani dan atau kelompok tani di gudang lini IV berdasarkan RDKK dengan harga tidak melebihi HET. Adapun HET yang ditentukan oleh Menteri Pertanian untuk pupuk bersubsidi adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2

HET untuk Pupuk bersubsidi Berdasarkan Permentan

No.60/S12.310/12/2015

Tahun	Urea (Rp)		Sp36 (Rp)		ZA(Rp)		NPK(Rp)	
	sebelum subsidi	setelah subsidi	sebelum subsidi	setelah subsidi	sebelum subsidi	setelah subsidi	sebelum subsidi	setelah subsidi
2011	3.300	1.600	2.850	2.000	2.900	1.400	4.900	2.300
2012	4.800	1.800	2.850	2.000	2.900	1.400	4.900	2.300
2013	4.800	1.800	4.600	2.000	2.900	1.400	4.900	2.300
2014	4.750	1.800	4.600	2.000	2.900	1.400	4.900	2.300
2015	4.750	1.800	4.600	2.000	2.900	1.400	4.900	2.300

Sumber : Permentan No.60/S12.310/12/2015

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pemerintah telah menetapkan harga untuk petani, namun pada kenyataannya di lapangan harga yang harus dibayar petani untuk membeli pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan Permentan No.60/S12.310/12/2015 tersebut. Sesuai dengan ketentuan permentan bahwa harga pupuk urea yang harus diterima oleh kelompok tani atau petani di lini ke IV (pengecer resmi) adalah Rp 1.800. Namun, dari data yang diperoleh di lapangan

berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada petani yang bernama oom dan tati pada tanggal 24 November 2016 jam 13.54 WIB di Desa Kalapadua, petani harus membayar Rp2.300 –Rp2.500. Padahal berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada distributor lini III wilayah Bantarujeg-Lemahsugih yaitu Engkos Koswara pada tanggal 2 Desember 2016 jam 10.55 WIB di Desa Bantarujeg harga pupuk urea per kilogram dari lini ke III (distributor) ke lini IV (pengecer resmi) adalah Rp.1.731.

Berdasarkan temuan awal penulis tersebut, maka penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK TERHADAP PRODUKSI TANAMAN PANGAN (PADI DAN JAGUNG) DI KECAMATAN LEMAHSUGIH KABUPATEN MAJALENGKA”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditentukan identifikasi masalah yang dianggap menarik untuk diteliti, antara lain :

1. Keterbatasan atau langkanya pupuk menyebabkan sulitnya petani dalam proses produksi pertanian.
2. Harga pupuk yang tidak sesuai dengan HET merugikan petani, karena tidak sesuai dengan kemampuan daya beli para petani tersebut.
3. Menurunnya produksi padi akibat proses tanam yang tidak maksimal.
4. Menurunnya produksi jagung akibat proses tanam yang tidak maksimal.

5. Kebijakan sistem distribusi yang merugikan petani, dimana dari sistem pendistribusian tersebut, petani malah harus mendapatkan harga yang jauh lebih mahal.
6. Tidak adanya pengawasan ketat dari pemerintah dalam pengawasan pendistribusian pupuk pada lini IV (pengecer).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh karakteristik masalah kebijakan subsidi pupuk terhadap produksi tanaman pangan (padi dan jagung) di Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka?
2. Seberapa besar pengaruh kemampuan kebijakan subsidi pupuk terhadap produksi tanaman pangan (padi dan jagung) di Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka?
3. Seberapa besar pengaruh variabel lingkungan kebijakan subsidi pupuk terhadap produksi tanaman pangan (padi dan jagung) di Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka?
4. Seberapa besar pengaruh karakteristik masalah kebijakan, kemampuan kebijakan, dan variabel lingkungan kebijakan subsidi pupuk terhadap produksi tanaman pangan (padi dan jagung) di Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti guna mengetahui dan mempelajari :

- 1 Untuk mengetahui besarnya pengaruh karakteristik masalah kebijakan subsidi pupuk terhadap produksi tanaman pangan (padi dan jagung) di Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka.
- 2 Untuk mengetahui besarnya pengaruh kemampuan kebijakan subsidi pupuk terhadap produksi tanaman pangan (padi dan jagung) di Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka.
- 3 Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel lingkungan kebijakan subsidi pupuk terhadap produksi tanaman pangan (padi dan jagung) di Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka.
- 4 Untuk mengetahui besarnya pengaruh karakteristik masalah kebijakan, kemampuan kebijakan dan variabel lingkungan kebijakan subsidi pupuk terhadap produksi tanaman pangan (padi dan jagung) di Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

- a. Bagi penulis, pada prinsipnya untuk mengembangkan teori-teori akademis dalam rangka memberikan kontribusi pemikiran dari segi efek keilmuan dan secara akademis dalam pengembangan konsep-konsep serta teori-teori kebijakan publik khususnya terkait produksi pertanian.
- b. Bagi lembaga terkait, dapat mengungkapkan suatu produk pengembangan keilmuan melalui teori yang ada dengan pendekatan dan metode baru.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis untuk menambah daya pikir dan pengembangan wawasan dalam rangka menerapkan hasil studi kebijakan publik yang dikaitkan dengan kebijakan subsidi pupuk.
- b. Bagi lembaga terkait diharapkan dapat memperkaya teori-teori pengembangan ilmu administrasi publik serta dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran dalam penelitian.

1.6 Kerangka pemikiran

Saat ini, permintaan akan hasil pertanian dari tahun ke tahun terus meningkat akibat dari pertumbuhan penduduk. Hal ini menjadi alasan pokok perlu adanya peningkatan produksi pertanian, terutama peningkatan produksi tanaman pangan.

Menurut Suparmoko (2000 : 75) yang dimaksud dengan produksi adalah transformasi atau pengubahan faktor produksi menjadi barang produksi, atau suatu proses dimana *input* diubah menjadi *output*.

Produksi pertanian menurut Daniel (2002 : 52) adalah hasil yang diperoleh petani pada saat panen. Bidang kegiatan yang dilakukan petani adalah kegiatan pertanian, produksi yang diusahakan adalah produksi yang didasari dengan prinsip ekonomi yaitu berusaha dengan memanfaatkan lahan tersedia dengan pengeluaran sekecil mungkin agar dapat diperoleh produk pertanian dalam jumlah maksimal.

Menurut Daniel terdapat 2 hal penting yang menentukan dalam proses produksi pertanian, yaitu faktor produksi dan sarana produksi.

a. Faktor Produksi

Faktor produksi merupakan faktor yang mutlak diperlukan dalam proses produksi. Faktor produksi dalam usaha tani merupakan unsur-unsur pokok yang juga merupakan faktor-faktor utama yang diperlukan dalam usaha tani. Faktor-faktor produksi merupakan input dalam proses produksi pertanian. Proses produksi pertanian adalah proses yang mengkombinasikan faktor-faktor produksi pertanian untuk menghasilkan produksi pertanian. Faktor produksi terdiri dari tanah, modal, tenaga kerja, manajemen dan teknologi.

b. Sarana Produksi

Sarana produksi adalah sarana yang dibutuhkan dalam proses produksi. Sarana yang dimaksudkan dalam bidang pertanian adalah segala sesuatu yang dapat menunjang proses budidaya dan dapat meningkatkan hasil budidaya tanaman pertanian. Dalam proses pertanian sarana produksi merupakan hal yang dapat menjadi kegunaan pokok yang harus dipenuhi kebutuhannya. Hasil

produksi pertanian sejalan dengan cara budidaya tanaman dan juga sejalan dengan tepatnya penggunaan sarana produksi yang dilakukan. Sarana produksi terdiri dari bibit, pupuk, pestisida, zat pengatur tumbuhan, dan Inokulasi.

Penggunaan faktor produksi pertanian yang tepat dan ketersediaan sarana produksi pertanian yang efektif akan menghasilkan produksi pertanian lokal yang baik. Hal ini tentunya ditunjang pula oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna meningkatkan hasil produksi pertanian yaitu dengan adanya kebijakan subsidi pupuk. Keberhasilan peningkatan hasil produksi pertanian ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana implementasi dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut dilaksanakan.

Menurut Santosa (2012:43) mengemukakan bahwa Implementasi kebijakan adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif. Implementasi merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam suatu kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Hal ini dipertegas oleh Udoji (1981) yang mengatakan bahwa : “pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan”. (Wahab, 2002 : 65).

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Ali dan Alam (2012 : 108-109), untuk mencapai keberhasilan suatu implementasi kebijakan, ada 3 variabel yang sangat berpengaruh, yaitu :

1. Karakteristik masalah kebijakan.

Terlepas dari kenyataan bahwa banyak sekali kesulitan-kesulitan yang dijumpai dalam implementasi program-program pemerintah, sebenarnya ada sejumlah masalah-masalah sosial yang jauh lebih mudah untuk ditangani bila dibandingkan dengan masalah lainnya. Aspek-aspek teknis dari permasalahan serta perilaku yang akan diatur sangat bervariasi sehingga hal ini menjadi kendala dalam implementasi program.

2. Kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi.

Pada prinsipnya pemerintah eksekutif untuk dapat menstrukturkan proses implementasi dengan cara menjabarkan tujuan-tujuan formal yang akan dicapainya dengan cara menseleksi lembaga-lembaga yang tepat untuk mengimplementasikannya, dengan cara memberikan kewenangan dan dukungan sumber-sumber finansial pada lembaga-lembaga tersebut. Para pembuat kebijakan dapat memainkan peran yang cukup berarti dalam rangka pencapaian tujuan kebijakan dengan cara mendayagunakan wewenang yang mereka miliki untuk menstrukturkan proses implementasi secara tepat.

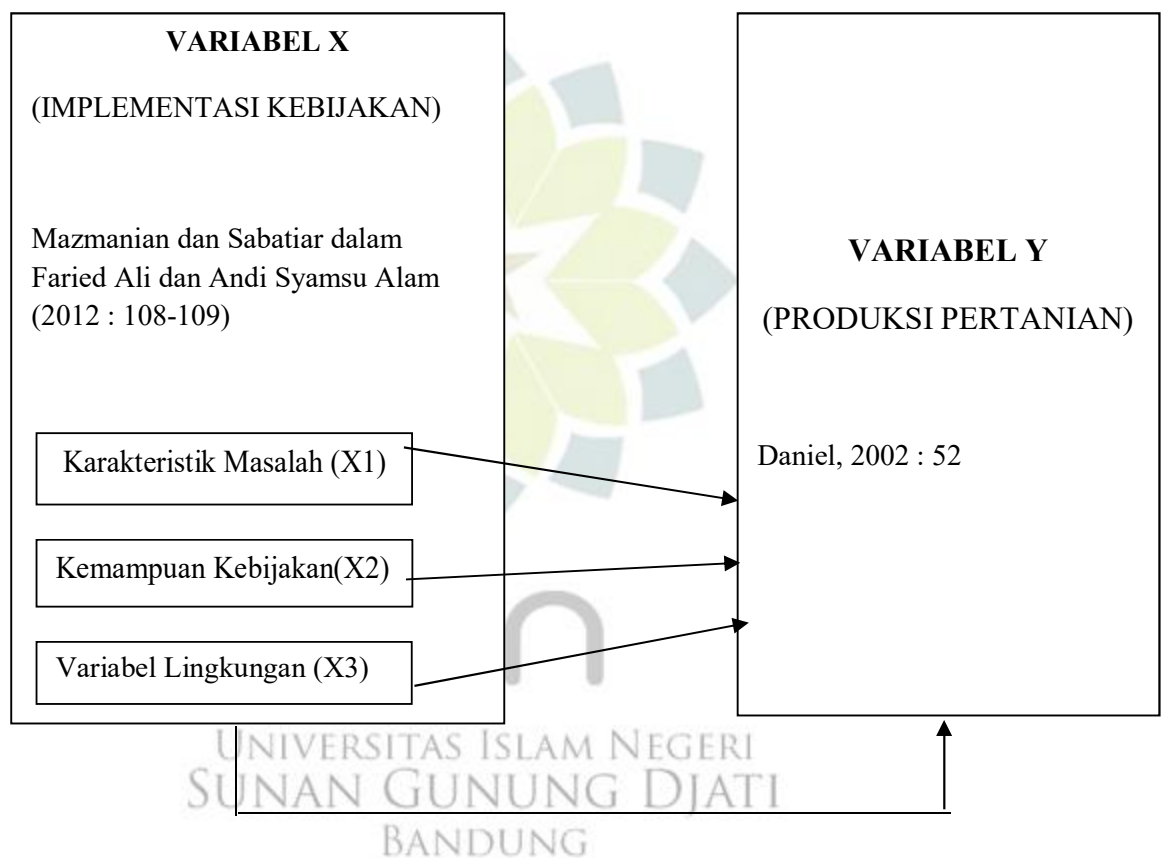
3. Variabel Lingkungan.

Dalam kesuksesan mengimplementasikan kebijakan, juga dipengaruhi oleh lingkungan dimana kebijakan itu dilaksanakan. Keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi seperti sosial ekonomi, teknologi dan lainnya akan sangat memberikan

dampak terhadap jalannya kebijakan dan juga hasil yang diharapkan dari implementasi kebijakan itu sendiri.

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



1.7 Hipotesis

Menurut Darmawan (2013:122) mengatakan bahwa “Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya”. Jadi hipotesis adalah pernyataan atau jawaban tentatif atas masalah dan kemudian hipotesis dapat diverifikasi hanya setelah hipotesis diuji secara empiris. Tujuan pengujian hipotesis

ialah untuk mengetahui kebenaran atau ketidakbenaran atau untuk menerima atau untuk menolak jawaban tentatif.

Bentuk hipotesis yang akan penulis ajukan dalam penelitian ini adalah hipotesis asosatif. Hipotesis asosatif adalah pernyataan yang menduga suatu hubungan antara dua variabel. (Silalahi, 2012 : 168).

1. Hipotesis 1

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan dari karakteristik masalah kebijakan subsidi pupuk (x_1) terhadap produksi pertanian tanaman pangan (padi dan jagung) (y) di Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka.

H₁ : Ada pengaruh yang signifikan dari karakteristik masalah kebijakan subsidi pupuk (x_1) terhadap produksi pertanian tanaman pangan (padi dan jagung) (y) di Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka.

2. Hipotesis 2

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan dari kemampuan kebijakan subsidi pupuk (x_2) terhadap produksi pertanian tanaman pangan

(padi dan jagung) (y) di Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka.

H₁ : Ada pengaruh yang signifikan dari kemampuan kebijakan subsidi pupuk (x₂) terhadap produksi pertanian tanaman pangan (padi dan jagung) (y) di Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka.

3. Hipotesis 3

H₀ : Tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel lingkungan kebijakan subsidi pupuk (x₃) terhadap produksi pertanian tanaman pangan (padi dan jagung) (y) di Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka.

H₁ : Ada pengaruh yang signifikan dari variabel lingkungan kebijakan subsidi pupuk (x₃) terhadap produksi pertanian tanaman pangan (padi dan jagung) (y) di Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka.

4. Hipotesis 4

H₀ :

Tidak ada pengaruh yang signifikan dari karakteristik masalah kebijakan subsidi pupuk (x_1), kemampuan kebijakan subsidi pupuk (x_2) dan variabel lingkungan kebijakan subsidi pupuk (x_3) terhadap produksi pertanian tanaman pangan (padi dan jagung) (y) di Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka.

H_1 : Ada pengaruh yang signifikan dari karakteristik masalah kebijakan subsidi pupuk (x_1), kemampuan kebijakan subsidi pupuk (x_2) dan variabel lingkungan kebijakan subsidi pupuk (x_3) terhadap produksi pertanian tanaman pangan (padi dan jagung) (y) di Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka.

